

Siaran Pers

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IPTEK UNTUK KEMAJUAN BANGSA: PENTINGNYA SISTEM NASIONAL IPTEK DAN INOVASI

Jakarta – Untuk memperkuat pemahaman pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa guna menghadapi persaingan global serta menggali masukan dari *stakeholders* terkait, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Seminar Nasional “Pembangunan Iptek untuk Kemajuan Bangsa” di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (30/8). Seminar yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) ini mengusung tiga topik utama, yaitu: 1) Arah Kebijakan Pembangunan Iptek, 2) Strategi Pembangunan Iptek, dan 3) Peran Industri/Pelaku Bisnis dan Peneliti/Ilmuwan dalam Pembangunan Iptek. Seminar nasional yang dirancang agar menghasilkan kerangka regulasi pembangunan iptek untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional tersebut dibagi menjadi dua sesi diskusi panel yang diawali dengan pidato kunci oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Siknas Iptek) Daryatmo Mardiyanto, dan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Muhammad Dimiyati.

Percepatan pembangunan ekonomi berbasis inovasi merupakan salah satu tahapan dalam pencapaian Visi Indonesia 2045. Pada Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (skenario optimistis), Indonesia diharapkan mampu keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036. Selanjutnya, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ketujuh pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun. Hal ini tentu saja hanya akan terjadi apabila penguatan struktur ekonomi dan percepatan pertumbuhan berbasis inovasi telah dilakukan. Peranan iptek dan inovasi pada setiap tahapan pertumbuhan ekonomi nasional dibedakan sesuai fokus pembangunan pada periode yang bersangkutan. Pada tahap pertama yaitu 2016-2025, iptek dan inovasi difokuskan untuk proses perubahan struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif. Pada tahap kedua yaitu tahun 2025-2035, iptek dan inovasi dimanfaatkan sebagai penghela industri manufaktur melalui penciptaan produk-produk ekspor bernilai tambah tinggi. Terakhir, pada 2036-2045, iptek dan inovasi akan berperan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia merespons revolusi industri 4.0 secara baik melalui beberapa kebijakan yang terfokus pada peningkatan daya saing bangsa di tengah persaingan global. Dengan meningkatkan peran iptek, Indonesia akan memacu produktivitas dan secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menteri Bambang. Setidaknya, terdapat delapan strategi untuk meningkatkan peranan iptek dan inovasi bagi pembangunan, pertumbuhan, dan produktivitas nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu Pusat Pengembangan Iptek dan inovasi di Kawasan Asia dan Dunia, antara lain: 1) Pembentukan Sistem Nasional Iptek dan Inovasi, serta inisiatif Dana Inovasi; 2) Peningkatan kapasitas institusi dan Pembibitan SDM Iptek; 3) Pengembangan teknologi berbasis potensi kewilayahan dan budaya; 4) Pengembangan penelitian sosial-humaniora untuk menunjang inovasi dan produktivitas di masyarakat; 5) optimalisasi foreign direct investment (FDI) dan global value chain (GVC) sebagai sarana alih teknologi; 6) pelembagaan *Triple Helix*; 7) pembangunan infrastruktur pendukung *research and development (R&D)* yang bernilai strategis; dan 8) penciptaan ekosistem yang kondusif untuk menumbuhkan *technopreneur* dan *startup*.

Dari strategi-strategi yang disebutkan tersebut, Sistem Nasional Iptek dan Inovasi merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh suatu negara yang ingin tumbuh dengan berbasiskan pada Iptek dan Inovasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengapresiasi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini sedang merancang Draf RUU Sisnas Iptek sebagai landasan pembangunan Iptek nasional di masa mendatang. Dengan adanya RUU Sisnas Iptek dan Inovasi sebagai payung hukum, pengembangan Iptek dan Inovasi dapat dilakukan secara lebih sistematis serta terintegrasi dengan aspek pendanaan. Kebijakan tersebut juga perlu didukung sinergi gerakan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan skema pendanaan.

Berdasarkan hasil studi literatur dan pengalaman dari negara-negara lain, terdapat Tujuh Komponen Penggerak Sistem Inovasi Nasional, yaitu: (1) Kebijakan yang Holistik, (2) Pendorong Inovasi, (3) Pengembangan Prioritas Unggulan, (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, (5) Infrastruktur Inovasi, (6) Sinergi dan Kolaborasi, serta (7) Evaluasi dan Pengembangan yang Berkelanjutan. Dari ketujuh komponen tersebut, hal yang paling elementer yang perlu diatur dalam Sistem Inovasi Nasional adalah “Komponen Sinergi dan Kolaborasi”, yaitu bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaku utama inovasi: pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha (*Triple Helix*).

“Dengan adanya sinergi *Triple Helix*, ketiga pihak tersebut dapat bersinergi untuk mengembangkan sistem inovasi yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan perekonomian. Penciptaan inovasi melalui *Triple Helix* dapat memacu pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Hal ini karena di dalam suatu inovasi terdapat nilai tambah akademik, sosial budaya, ekonomi, dan komersial,” tegas Menteri Bambang. Di dalam kolaborasi kelembagaan *Triple Helix*, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, penghasil, dan pengguna hasil inovasi. Di pihak yang lain, perguruan tinggi dan lembaga iptek berperan sebagai penghasil dan pengguna hasil inovasi. Bersamaan dengan itu, industri dan dunia usaha berperan sebagai penghasil, pendorong, dan pengguna hasil inovasi.

Seminar Nasional “Pembangunan Iptek untuk Kemajuan Bangsa” dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan, meliputi perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pengusaha, serta masyarakat penggiat dan pemerhati bidang iptek. Pada diskusi panel pertama, topik terkait ‘Strategi Pembangunan Iptek’ dibahas oleh pemateri mumpuni dari beberapa kementerian/lembaga, yaitu Deputy Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko, Direktur Jenderal Perguruan Tinggi bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Muhammad Dimiyati, Deputy Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material Eniya Listiani Dewi, serta Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika-Kementerian Perindustrian Harjanto. Peran Industri/Pelaku Bisnis dan Peneliti/Illmuwan dalam Pembangunan Iptek” menjadi topik yang dibahas pada diskusi panel kedua. Komisararis PT Regio Aviasi Industri Ilham Akbar Habibie, Pendiri Ruangguru Adamas Belva Syah Devara, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro serta Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Bidang Riset Fundamental sekaligus Penerima Habibie Award 2008 Herawati Sudoyo berbagi pandangan dan pengalaman praktik yang baik sebagai praktisi di bidang iptek. Pembahasan diskusi menjadi masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas, Kemristekdikti, dan juga Pansus RUU Sisnas Iptek untuk memperkuat kebijakan yang terkait Iptek dan Inovasi di Indonesia. Selain seminar interaktif, acara ini juga turut diramaikan dengan pameran inovasi dari beberapa perguruan tinggi yaitu ITB, IPB, UGM serta Kementerian/Lembaga Iptek yaitu LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN dan Dirjen Inovasi Kemenristdikti.

Jakarta, 30 Agustus 2018

Parulian Silalahi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan sejumlah fungsi, antara lain pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.

Knowledge Sector Initiative (KSI) - <http://www.ksi-indonesia.org/en/home>

Program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik yang lebih berkualitas, yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.